



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 135 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, perlu menata organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Teknis di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2227/M.PAN-RB/7/2015 tanggal 2 Juli 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 45A dan 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Dalam hal terdapat pembangunan pelabuhan baru dan telah melaksanakan kegiatan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di luar lampiran Peraturan Menteri ini, kegiatan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan baru tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terdekat sampai dengan ditetapkan sebagai wilayah kerja.

Pasal 45B

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dievaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

2. Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

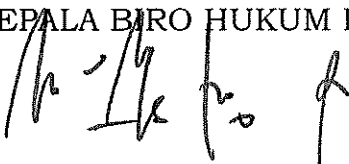
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1401

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 135 Tahun 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN

DAFTAR

**NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN,
LOKASI, DAN WILAYAH KERJA**

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I (Eselon II.b)
(jumlah 9 lokasi), terdiri dari:

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Kantor Kesyahbandaran dan OP Dumai	Dumai, Riau	1) Wilayah Kerja Lubuk Gaung 2) Wilayah Kerja Pelintung
2	Kantor Kesyahbandaran dan OP Panjang	Panjang, Lampung	1) Wilayah Kerja Sebalang 2) Wilayah Kerja Ranggai
3	Kantor Kesyahbandaran dan OP Banten	Banten, Banten	1) Wilayah Kerja Ciwandan 2) Wilayah Kerja Cigading 3) Wilayah Kerja Merak 4) Wilayah Kerja Pulo Ampel
4	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tg Emas	Semarang, Jawa Tengah	1) Wilayah Kerja Kendal 2) Wilayah Kerja Morodemak
5	Kantor Kesyahbandaran dan OP Banjarmasin	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	-
6	Kantor Kesyahbandaran dan OP Balikpapan	Semayang, Kalimantan Timur	Wilayah Kerja Mentawir
7	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bitung	Bitung, Sulawesi Utara	Wilayah Kerja Kema
8	Kantor Kesyahbandaran dan OP Ambon	Ambon, Maluku	-

6

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
9	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sorong	Sorong, Papua Barat	1) Wilayah Kerja Kalobo 2) Wilayah Kerja Makbon 3) Wilayah Kerja Mega 4) Wilayah Kerja Tanjung Kasuari 5) Wilayah Kerja Saoka 6) Wilayah Kerja Kawasan Arar 7) Wilayah Kerja Seget 8) Wilayah Kerja Sele 9) Wilayah Kerja Salawati

6

b. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II (Eselon III.a)
(jumlah 15 lokasi), terdiri dari:

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Pinang	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	1) Wilayah Kerja Dompok 2) Wilayah Kerja Pangkil 3) Wilayah Kerja Tanjung Moco
2.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Balai Karimun	Karimun, Kepulauan Riau	1) Wilayah Kerja Pasir Panjang 2) Wilayah Kerja Pulau Buru
3.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kijang	Kijang, Kepulauan Riau	1) Wilayah Kerja Kawal 2) Wilayah Kerja Numbing
4.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Teluk Bayur	Padang, Sumatera Barat	1) Wilayah Kerja Air Bangis 2) Wilayah Kerja Tiku 3) Wilayah Kerja Sasak 4) Wilayah Kerja Pariaman 5) Wilayah Kerja Carocok Terusan 6) Wilayah Kerja Carocok Painan 7) Wilayah Kerja Panasahan Painan 8) Wilayah Kerja Bungus
5.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Palembang	Palembang, Sumatera Selatan	1) Wilayah Kerja Tanjung Api-api 2) Wilayah Kerja Prambatan 3) Wilayah Kerja Sungai Lilin 4) Wilayah Kerja Karang Agung 5) Wilayah Kerja Gandus 6) Wilayah Kerja Jakabaring 7) Wilayah Kerja Musi Rawas
6.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Cirebon	Cirebon, Jawa Barat	1) Wilayah Kerja Astanajapura 2) Wilayah Kerja Gebang Mekar 3) Wilayah Kerja Kejawanan 4) Wilayah Kerja Bondet
7.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Cilacap	Cilacap, Jawa Tengah	1) Wilayah Kerja Bunton 2) Wilayah Kerja Tegalkamulyan
8.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Gresik	Gresik, Jawa Timur	-
9.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Benoa	Benoa, Bali	1) Wilayah Kerja Serangan 2) Wilayah Kerja Tanjung Benoa 3) Wilayah Kerja Kedonganan 4) Wilayah Kerja Sanur

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
10.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pontianak	Pontianak, Kalimantan Barat	1) Wilayah Kerja Mempawah 2) Wilayah Kerja Sungai Kakap 3) Wilayah Kerja Teluk Pakedai 4) Wilayah Kerja Kubu
11.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	1) Wilayah Kerja Mahakam Hulu 2) Wilayah Kerja Sanga- Sanga 3) Wilayah Kerja Muara Berau
12.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kendari	Kendari, Sulawesi Tenggara	Wilayah Kerja Soropia
13.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Ternate	Ternate, Maluku Utara	1) Wilayah Kerja Sulamadah 2) Wilayah Kerja Hiri 3) Wilayah Kerja Tifure 4) Wilayah Kerja Mayau 5) Wilayah Kerja Jambula
14.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Jayapura	Jayapura, Papua	1) Wilayah Kerja Demta 2) Wilayah Kerja Depapre 3) Wilayah Kerja Muara Tami 4) Wilayah Kerja Holtekam
15.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Biak	Biak, Papua	Wilayah Kerja Bosnik

6

c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (Eselon III.b)
(Jumlah 16 lokasi), terdiri dari:

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Lhokseumawe	Aceh Utara, Aceh	-
2.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	1) Wilayah Kerja Buatan 2) Wilayah Kerja Siak Sri Indrapura
3.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Enok	Indragiri Hilir, Riau	Wilayah Kerja Muara Bakong
4.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sungai Pakning	Bengkalis, Riau	1) Wilayah Kerja Bukit Batu 2) Wilayah Kerja Lubuk Muda 3) Wilayah Kerja Tanjung Buton 4) Wilayah Kerja Sungai Apit 5) Wilayah Kerja Bandul 6) Wilayah Kerja Belitung
5.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pulau Sambu	Pulau Sambu, Kepulauan Riau	1) Wilayah Kerja Pulau Bulan 2) Wilayah Kerja Pulau Jangkat 3) Wilayah Kerja Pulau Nipah
6.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Talang Duku	Jambi, Jambi	-
7.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pulau Baai	Bengkulu, Bengkulu	1) Wilayah Kerja Ketahun 2) Wilayah Kerja Muko- Muko 3) Wilayah Kerja Pulau Tikus
8.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sunda Kelapa	Jakarta Utara, DKI Jakarta	-
9.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Wangi	Banyuwangi, Jawa Timur	-
10.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Lembar	Lombok Barat, NTB	1) Wilayah Kerja Jeranjang 2) Wilayah Kerja Teluk Sepi 3) Wilayah Kerja Labuhan Poh- Sekotong 4) Wilayah Kerja Teluk Awang
11.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kupang	Kupang, NTT	1) Wilayah Kerja Pelabuhan Tenau 2) Wilayah Kerja Nunbaunsabu 3) Wilayah Kerja Kolbano 4) Wilayah Kerja Boking 5) Wilayah Kerja Semau 6) Wilayah Kerja Sulamu

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAB DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
12.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sampit	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	1) Wilayah Kerja Kuala Kuayan 2) Wilayah Kerja Parenggean
13.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tarakan	Tarakan, Kalimantan Utara	3) Wilayah Kerja Malinau 4) Wilayah Kerja Bangkudulis 5) Wilayah Kerja Bebatu 6) Wilayah Kerja Sesayap
14.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Manado	Manado, Sulawesi Utara	7) Wilayah Kerja Wori 8) Wilayah Kerja Tanawangko 9) Wilayah Kerja Tumumpa
15.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pantoloan	Donggala, Sulawesi Tengah	-
16.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pare-pare	Makassar, Sulawesi Selatan	-

6

d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV (Eselon IV.a)
(Jumlah 16 lokasi), terdiri dari :

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Malahayati	Aceh Utara, Aceh	1) Wilayah Kerja Pulau Aceh 2) Wilayah Kerja Lhok Nga
2.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pangkalan Susu	Pangkalan Brandan, Sumatera Utara	Wilayah Kerja Pangkalan Brandan
3.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tembilahan	Indragiri Hilir, Riau	-
4.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Cinaku	Indragiri Hulu, Riau	-
5.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pangkal Balam	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	1) Wilayah Kerja Belinyu 2) Wilayah Kerja Sungai Liat 3) Wilayah Kerja Sei Selan
6.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tegal	Tegal, Jawa Tengah	1) Wilayah Kerja Jongor Tegalsari 2) Wilayah Kerja Larangan
7.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Probolinggo	Probolinggo, Jawa Timur	1) Wilayah Kerja Kalibuntu 2) Wilayah Kerja Paiton
8.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Padangbai	Karangasem, Bali	1) Wilayah Kerja Manggis 2) Wilayah Kerja Amed 3) Wilayah Kerja Kubu 4) Wilayah Kerja Tanah Ampo 5) Wilayah Kerja Kusamba
9.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bima	Bima, NTB	-
10.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kumai	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	-
11.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kotabaru	Kota Baru, Kalimantan Selatan	1) Wilayah Kerja Batulicin 2) Wilayah Kerja Pegatan
12.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Nunukan	Nunukan, Kalimantan Timur	1) Wilayah Kerja Sebuku Kab. Nunukan 2) Wilayah Kerja Sebakis 3) Wilayah Kerja Semenggaris
13.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Gorontalo	Gorontalo, Gorontalo	Wilayah Kerja Molotabu
14.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Toli-toli	Toli-toli, Sulawesi Tengah	Wilayah Kerja Laulalang

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAB DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
15.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Merauke	Merauke, Papua	1) Wilayah Kerja Kumbe 2) Wilayah Kerja Erambu 3) Wilayah Kerja Semangga 4) Wilayah Kerja Tanah Miring 5) Wilayah Kerja Bian 6) Wilayah Kerja Wanam
16.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Manokwari	Manokwari, Papua Barat	1) Wilayah Kerja Sowi Marmpa 2) Wilayah Kerja Saukorem 3) Wilayah Kerja Maruni

6

e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V (Eselon IV.b)
(jumlah 40 lokasi), terdiri dari:

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sabang	Sabang, NAD	Wilayah Kerja Balongan
2.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Meulaboh	Aceh Barat, NAD	1) Wilayah Kerja Johan Pahlawan 2) Wilayah Kerja Meureubo 3) Wilayah Kerja Kuala Pesisir 4) Wilayah Kerja Kuala Bubon
3.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Langsa	Aceh Timur, NAD	-
4.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Balai Asahan	Asahan, Sumatera Utara	Wilayah Kerja Bagan Asahan
5.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Tanjung	Kisaran, Sumatera Utara	Wilayah Kerja Medang Deras
6.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sibolga	Sibolga, Sumatera Utara	-
7.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Gunung Sitoli	Nias, Sumatera Utara	-
8.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bagan Siapi-api	Bengkalis, Riau	Wilayah Kerja Pulau Halang
9.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bengkalis	Bengkalis, Riau	1) Wilayah Kerja Teluk Pambang 2) Wilayah Kerja Bantan Tengah
10.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Selat Panjang	Bengkalis, Riau	1) Wilayah Kerja Tanjung Samak 2) Wilayah Kerja Tanjung Kedabu
11.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Tungkal	Tanjung Jabung Barat, Jambi	Wilayah Kerja Betara
12.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Muara Sabak	Tanjung Jabung, Jambi	-
13.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Pandan	Belitung, Bangka Belitung	1) Wilayah Kerja Tanjung Roe 2) Wilayah Kerja Tanjung Batu
14.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Muntok	Bangka, Bangka Belitung	Wilayah Kerja Tanjung Ular

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
15.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bakauheuni	Lampung, Lampung Selatan	1) Wilayah Kerja Kalianda 2) Wilayah Kerja Ketapang 3) Wilayah Kerja Muara Piluk 4) Wilayah Kerja Kampung Sumur
16.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Marunda	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Wilayah kerja Tarumajaya
17.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu, DKI Jakarta	1) Wilayah Kerja Untung Jawa 2) Wilayah Kerja Pulau Lacang 3) Wilayah Kerja Pulau Tidung 4) Wilayah Kerja Pulau Pramuka 5) Wilayah Kerja Pulau Kelapa
18.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kalibaru	Jakarta Utara, DKI Jakarta	-
19.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Muara Angke	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Wilayah Kerja Muara Kamal
20.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Muara Baru	Jakarta Utara, DKI Jakarta	-
21.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pasuruan	Pasuruan, Jawa Timur	1) Wilayah Kerja Lekok 2) Wilayah Kerja Sendang Biru 3) Wilayah Kerja Prigi 4) Wilayah Kerja Grati
22.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Panarukan	Situbondo, Jawa Timur	1) Wilayah Kerja Pasir putih 2) Wilayah Kerja Besuki
23.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kalianget	Sumenep, Jawa Timur	1) Wilayah Kerja Pasongsongan 2) Wilayah Kerja Ambunten 3) Wilayah Kerja Pragaan 4) Wilayah Kerja Giligenting 5) Wilayah Kerja Tanjung Saronggi 6) Wilayah Kerja Pagarbatu 7) Wilayah Kerja Dungkek 8) Wilayah Kerja Longos 9) Wilayah Kerja Bintaro
24.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Celukan Bawang	Buleleng, Bali	1) Wilayah Kerja Pegamatan 2) Wilayah Kerja Brombong

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
25.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Badas	Sumbawa, NTB	1) Wilayah Kerja Pulau Moyo 2) Wilayah Kerja Ai Barik 3) Wilayah Kerja Teluk Santong 4) Wilayah Kerja Labangka 5) Wilayah Kerja Pelabuhan Jambu
26.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Waingapu	Sumbawa Timur, NTT	1) Wilayah Kerja Baing 2) Wilayah Kerja Salura 3) Wilayah Kerja Katundu
27.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Ende	Ende, NTT	1) Wilayah Kerja Pulau Ende 2) Wilayah Kerja Maurolo 3) Wilayah Kerja Ropa 4) Wilayah Kerja Maumbawa
28.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Laurentius Say	Sikka Maukere, NTT	1) Wilayah Kerja Wuring 2) Wilayah Kerja Pemana 3) Wilayah Kerja Sukun 4) Wilayah Kerja Palue
29.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kalabahi	Alor, NTT	1) Wilayah Kerja Maritaing 2) Wilayah Kerja Moru 3) Wilayah Kerja Alor Kecil
30.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Teluk Air	Sambu, Kalimantan Barat	Wilayah Kerja Padang Tikar
31.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sintete	Singkawang, Kalimantan Barat	1) Wilayah Kerja Tambelan 2) Wilayah Kerja Sambas 3) Wilayah Kerja Singkawang 4) Wilayah Kerja Pemangkat 5) Wilayah Kerja Sungai Duri 6) Wilayah Kerja Serasan
32.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Ketapang	Ketapang, Kalimantan Barat	1) Wilayah Kerja Satong 2) Wilayah Kerja Pasaguan 3) Wilayah Kerja Pasar Sentap
33.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Pembuang	Seruyan, Kalimantan Tengah	Wilayah Kerja Teluk Segintung
34.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Samuda	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	-
35.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pulang Pisau	Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	1) Wilayah Kerja Kuala Kapuas 2) Wilayah Kerja Bahaur 3) Wilayah Kerja Kerengbengkirai

6

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
36.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pangkalan Bun	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	-
37.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sukamara	Sukamara, Kalimantan Tengah	1) Wilayah Kerja Kuala Jelai 2) Wilayah Kerja Jambi 3) Wilayah Kerja Balai Riang
38.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pegatan Mendawai	Katingan, Kalimantan Tengah	-
39.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bandanaire	Maluku Tengah, Maluku	Wilayah Kerja Kumber
40.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Fak-fak	Fak-fak, Papua Barat	1) Wilayah Kerja Weri 2) Wilayah Kerja Karas

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

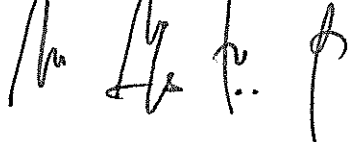
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1401

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001